

Upaya Intervensi Amerika Melakukan Demokratisasi di Irak dan Suriah menjelang Arab Spring melalui *Forward Strategy for Freedom In the Middle East* (2003-2013)

Fika Nurislamia¹

Abstrack

Arab Spring is a world-shocking event when the Middle East is in turmoil. Demonstrators took to the streets to demand the decline of an authoritarian regime and replace it with democracy. The process of democratization that took place in the Middle East became the world's spotlight. America is considered as a State that intervenes so that democratization is realized in the Middle East. This is supported by various American interests in the Middle East. By using Peace Democracy Theory and the concept of Intervention, the authors get the results of a strategy carried out by America to realize democratization in the Middle East.

Arab Spring merupakan sebuah peristiwa menggemparkan dunia ketika Timur Tengah bergejolak. Para demonstran turun ke jalan untuk menuntut turunnya rezim otoriter dan menggantinya dengan demokrasi. Proses demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah menjadi sorotan dunia. Amerika dianggap sebagai Negara yang mengintervensi agar demokratisasi terwujud di Timur Tengah. Hal tersebut didukung dengan berbagai kepentingan Amerika di Timur Tengah. Dengan menggunakan *Peace Democracy Theory* dan konsep Intervensi, penulis mendapatkan hasil strategi yang dilakukan oleh Amerika untuk mewujudkan demokratisasi di Timur Tengah.

Keyword: *Arab Spring, Democracy, United States*

Pendahuluan

¹ Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55111
nurislamiaf@gmail.com

Pada tanggal 17 Desember 2010 merupakan awal terjadinya pergolakan di Timur Tengah. Peristiwa bakar diri yang dilakukan Mohammed Bouazizi berhasil membakar amarah dari rakyat Tunisia yang sudah terkekang dengan pemerintahan otoriter. Demonstrasi terjadi selama berbulan-bulan menuntut turunnya rezim yang sudah lama berkuasa. Protes yang berlangsung di Tunisia ini kemudian menyebar ke Negara-Negara Timur Tengah lainnya. Dengan dalih memiliki kesamaan karena terkungkung dalam pemerintahan korup, para demonstran membuat sebuah revolusi besar-besaran yang bukan hanya mengganti pemimpin yang berkuasa namun juga mengganti system pemerintahan yang semula otoriter menjadi demokrasi. Demokrasi merupakan hal yang baru bagi Timur Tengah. Tidak mudah bagi Negara yang sebelumnya tidak mengenal demokrasi untuk merubah semua pola dan bentuk kehidupannya menjadi demokrasi. Ditambah Timur Tengah merupakan Negara Islam yang tentunya banyak dibicarakan tidak sesuai apabila menggunakan paham demokrasi. Hal ini disebabkan karena demokrasi merupakan produk Negara barat yang banyak dianggap bertentangan dengan pemikiran Islam. Dalam perkembangannya, demokrasi sering disangkut pautkan dengan Amerika sebagai Negara paling demokrasi di dunia. Selain itu juga Amerika memiliki ambisi untuk menyebarkan demokrasi ke berbagai belahan dunia. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk intervensi Amerika dalam konflik Arab Spring, serta apa saja kepentingan Amerika dalam konflik Arab Spring.

Metode Penelitian

Tulisan ini memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dalam kajian tersebut, penulis membaca karya-karya yang terkait dengan tema yang diangkat. Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menggunakan literatur untuk mendapatkan data, dan kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membingkai data yang dianalisis. Landasan teoritik yang digunakan adalah intervensi dan *peace democracy theory*.

Pembahasan

Awal Mula Arab Spring

Arab Spring merupakan sebuah kalimat yang menggemparkan dunia baru- baru ini. Pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2010 sampai tahun 2011 bahkan sampai tahun 2013 merupakan pergolakan politik terberat yang dialami oleh negara- negara Timur Tengah. Bergugurannya satu demi satu pemimpin negara- negara di Timur Tengah seperti bergugurannya daun- daun pada saat musim semi menyebabkan peristiwa pergolakan politik ini disebut dengan *Arab Spring*(Wangke, 2012). Bentuk dari Arab Spring ini adalah demonstrasi, kampanye anti pemerintah serta pemanfaatan social media untuk menjatuhkan pemerintah(Korotayev & Zinkina, 2011). Tujuan dari *Arab Spring* ini adalah menjatuhkan rezim- rezim otoriter Timur Tengah dan pengembalian kekuasaan kepada rakyat.

Kejadian *Arab Spring* ini bermula dari Tunisia, ketika salah satu penjual buah di Tunisia bernama Mohamed Bouazizi yang berusia 26 tahun nekat melakukan bakar diri karena diperlakukan sewenang- wenang oleh petugas yang menagih uang denda dagangannya. Tidak terima dengan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh petugas tersebut, Bouazizi kemudian melapor kepada pejabat pemerintah setempat. Namun yang diterima Bouazizi nihil, aduannya tidak ditanggapi. Kekecewaan Bouazizi berakhir tragis, Dia kemudian membakar diri sebagai bentuk protes.

Hal tersebut memancing emosi rakyat Tunisia dan terjadilah demo besar- besaran di seluruh wilayah Tunisia. Rakyat meneriakan frustrasi dan amarahnya terhadap pemerintah karena kesulitan ekonomi yang semakin menjadi- menjadi. Perekonomian Tunisia yang semakin memburuk membuat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Ditambah dengan

otoriternya sistem pemerintahan di Tunisia memperburuk keadaan. Rakyat menuntut Presiden Ben Ali yang berkuasa selama 33 tahun dipaksa untuk lengser dari jabatannya(Sahrasad, 2013). Pemilu di Tunisia dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2011 merupakan pemilu pertama pasca diterapkannya demokrasi di Negara ini. Pemilu ini diikuti oleh 4.308.888 dari sebanyak 8.289.924 orang pemilih(Juliandi, 2016).

Apa yang terjadi di Tunisia kemudian menjamur ke negara- negara Arab yang lainnya. Libya, negara yang berbatasan langsung dengan Tunisia menjadi negara di kawasan Timur Tengah yang melakukan aksi besar- besaran selanjutnya. Perang sipil yang terjadi di Libya berawal dari unjuk rasa yang dilakukan di Benghazi pada tahun 2011. Tujuan dari unjuk rasa ini adalah menuntut mundurnya Muammar Khaddafi dari jabatannya sebagai pemimpin Libya. Perang bermula dari tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes sehingga protes ini mengalami eskalasi menjadi perang saudara dan sebuah pemberontakan. Perang ini mengakibatkan ribuan warga Libya mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara kedua kelompok bersenjata itu saling serang dengan senapan, meriam anti- pesawat dan roket. Gerakan protes anti pemerintah kemudian berhasil memaksa Khaddafi keluar dari persembunyiannya hingga akhirnya tewas di tangan oposisi pada tahun 2012 (Fakhry Ghafur, 2014). Di bawah Dewan Transisi Nasional, Libya mengadakan Pemilu Parlemen yang dilaksanakan pada Juli 2012(Fakhry Ghafur, 2014). Perang sipil Libya dikabarkan merupakan salah satu revolusi sosial- politik yang terjadi di jazirah Arab bersama- sama dengan Tunisia dan Mesir.

Revolusi juga terjadi di Maroko. Maroko melakukan demokratisasi dengan pemilu multi partai pada 27 November 2011. Hal tersebut terjadi karena ketakutan dari Raja Maroko, King Muhammad IV akan terjadinya gelombang aksi yang sama dengan Tunisia dan Mesir. Demokratisasi yang dilakukan oleh Maroko juga diikuti oleh Aljazair dan Yordania. Kedua negara tersebut mengikuti jejak Maroko untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Berbeda dengan Bahrain, dimana kelompok mayoritas Syiah harus

menghadapi kelompok minoritas Sunni yang dibantu oleh Arab Saudi(Jatmika, 2016).

Dampak dari Arab Spring masih terjadi di Suriah sampai sekarang. Kelompok oposisi menuntut Presiden Bashar Assad untuk turun dari jabatannya. Kelompok minoritas yang berada dibawah Assad harus melawan kelompok minoritas yang didominasi oleh kalangan Sunni. Karena kelompok yang mendukung presiden merupakan kelompok minoritas, maka kelompok ini meminta bantuan dari luar seperti Iran, Hezbollah dan juga Rusia untuk dapat menghadang kekuatan dari kelompok mayoritas. Pada Februari 2011, situs- situs social media yang berada di dalam maupun di luar Suriah menyerukan demonstrasi besar- besaran menuntut agar pemerintah malakukan reformasi. Pendukung reformasi yang berada di luar Suriah mengirimkan modem satelit, telepon seluler serta alat- alat social media lainnya untuk mendukung hal tersebut(Hermawan & M. Nur Rokhman, 2016).

17 Desember 2010 merupakan hari Bouazizi melakukan aksi bakar sekaligus dianggap sebagai awal terjadinya *Arab Spring*. Melihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini, yang patut kita soroti adalah pemerintahan yang otoriter dan massa. Massa merasa terintimidasi dengan pemerintahan yang otoriter dan terdorong untuk keluar dari kesewenangwenangan pemerintah. Keberhasilan yang terjadi di Tunisia menjadi tolak ukur negara- negara tetangganya untuk melakukan kejadian serupa.

Sebagian besar tuntutan di negara- negara yang mengalami *Arab Spring* adalah adanya demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah oase ditengah gurun otoriter Timur Tengah. Masyarakat menuntut adanya pergantian pemimpin yang dilakukan secara berkala. Hal tersebut mereka harapkan agar pemimpin mereka dapat memimpin dengan benar dan menerima aspirasi serta masukan dari rakyatnya. Hal yang menyatukan para demonstiran selain karena kesepahaman dalam penderitaan yang dialami juga adalah karena agama yang dianut. Kesepahaman atas penderitaan dan agama dapat mengurangi dampak kerugian dan resiko yang timbul dari

demonstrasi tersebut. Pertanyaan baru yang muncul dalam benak setiap orang adalah, apakah demokratisasi di Timur Tengah tidak ada campur tangan dari negara paling demokrasi di dunia sekaligus negara adidaya, yakni Amerika Serikat?

Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah

Kebijakan luar negeri suatu Negara bergantung pada kepentingan Negara itu sendiri. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang memiliki sedikitnya tiga kepentingan di Timur Tengah. Menurut Bowman (2008:78), kepentingan Amerika yang pertama adalah mengamankan dan tidak adanya rintangan aliran minyak yang mengalir dari kawasan teluk Persia ke Amerika Serikat serta Negara- Negara industry lainnya, kepentingan ini merupakan kepentingan jangka panjang. Untuk pengamanan kepentingan tersebut, maka Negara- Negara Barat perlu menjaga cadangan minyak dari serangan teroris atau gangguan dari Negara musuh. Kedua, kepentingan Amerika VSerikat di Timur Tengah adalah memastikan tidak adanya actor Negara ataupun non- Negara yang memproduksi, memperoleh atau menggunakan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction). Negara yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat pada saat ini adalah Iran. Iran memamerkan kepada dunia senjata pemusnah massal yang membuat Amerika merasa tidak aman. *Ketiga*, membantu Timur Tengah agar tidak menjadi sarang ataupun pengekspor ekstrimis Islam. Ekstrimisme Islam disini adalah kelompok- kelompok Islam yang berusaha memperjuangkan kembali tegaknya Negara Islam. Hal tersebut membuat Amerika Serikat berusaha melawan ekstrimisme ini. Para kelompok ekstrimisme melakukan kekacauan sehingga mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah. Selain itu ketakutan Amerika juga bertambah apabila senjata pemusnah massal jatuh ke tangan para kelompok estrimis, korban yang berjatuhan tentunya akan berlipat kali lebih banyak.

Urusan memberantas teroris ini kemudian menjadi urusan bersama. Para pemimpin dunia tunduk pada tuntutan Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan ketakutan Negara- Negara lain

akan serangan teroris. Perang melawan teroris pun mulai dikibarkan. Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk keamanan nasionalnya. Kebijakan- kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. US Patriot Act

Ketakutan Amerika Serikat terhadap teroris semakin bertambah setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 dimana dalam kejadian tersebut menewaskan banyak warga Amerika serta menghancurkan menara kembar World Trade Center yang merupakan simbol Negara tersebut. Hal tersebut membuat Amerika mengeluarkan USA *Patriot Act* yakni sebuah Undang- undang yang disahkan oleh kongres dan isinya melegitimasi semua tindakan terorisme yang mengancam Amerika. Selain itu, Undang- undang ini juga memberikan otoritas kepada lembaga- lembaga intelejen untuk dapat melakukan penyadapan telepon, melakukan rekaman serta penyadapan pada komputer.

USA *Patriot Act* diperkuat dengan adanya Doktrin Bush yang mengandung *Preemptive Action* untuk dapat menyerang lebih awal terhadap sasaran yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Berikut merupakan cara- cara yang dilakukan oleh USA *Patriot Act*, diantaranya:

1. Mengizinkan para petugas hukum untuk menggunakan alat- alat yang telah disediakan untuk mengamankan kejahatan- kejahatan terorganisir seperti pengedaran narkoba.
2. Badan- badan penegak hukum di seluruh wilayah Amerika Serikat saling memberikan informasi serta melakukan kerjasama.
3. Menyediakan peralatan berteknologi tinggi yang berguna untuk melakukan pelacakan serta penyidikan apabila dicurigai adanya ancaman yang mengarah pada tindakan teroris.

Menambah hukuman terhadap para pelaku teroris yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hukuman tersebut juga berlaku terhadap kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan teroris seperti pembakaran suatu tempat dengan disengaja.(United States Government, 2001)

2. *Department of Homeland Security (DHS)*

Tragedy 11 September 2001 meninggalkan duka serta trauma mendalam bagi Amerika Serikat, bahkan Amerika sendiri memasukan peristiwa tersebut kedalam kategori perang. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, Presiden Bush mengeluarkan sebuah pengumuman tentang pembentukan suatu kantor yang dikenal dengan nama *Office of Homeland Security (OHS)*. *OHS* ini sendiri berdiri tanggal 21 September 2001. Fungsi dari *OHS* ini adalah sebagai coordinator dari sekitar 40 cabang pemerintah yang memiliki tugas memerangi teroris. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2002, Presiden Bush mengusulkan pembentukan *Department of Homeland Security (DHS)*. Departemen ini akan menyatukan sekitar 22 cabang pemerintahan di bawah departemen tunggal. *DHS* ini juga memiliki tugas pokok, yakni diantaranya: melindungi perbatasan, bandara- bandara, pelabuhan- pelabuhan, kemudian memonitor pendatang asing yang datang ke Amerika, mengatur kesiapsiagaan serta membantu melengkapi responder awal. Dapat kita simpulkan bahwa *DHS* memiliki empat tugas pokok, diantaranya:

1. Menjaga perbatasan serta pusat- pusat transportasi, dengan melakukan hal ini *DHS* diharapkan dapat mencegah masuknya teroris ke wilayah Amerika Serikat.
2. *DHS* bekerjasama dengan keamanan local setempat agar dimana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat direspon dengan cepat.
3. Melakukan kerjasama dengan para peneliti untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi adanya bahaya khususnya bahaya dari senjata kimia, radiologi, biological dan yang paling ditakutkan yakni senjata nuklir
4. Menganalisis informasi- informasi yang berkaitan dengan informasi intelejen yang masuk ke semua wilayah Amerika Serikat serta menganalisa gambaram ancaman yang akan datang ke wilayah Amerika. (*DHS*, 2008)

Selain itu, secara umum, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan Negara tersebut untuk memperluas demokrasi atau melakukan demokratisasi Negara- Negara yang belum menganut paham demokrasi. Karena politik luar negeri merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestic dan lingkungan internasionalnya, maka begitupun dengan politik

luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan Luar Negeri Amerika dibuat dengan alasan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, walaupun mereka beralih kebijakan tersebut juga demi kepentingan masyarakat internasional.

3. *US National Security Strategy*

Serangan teroris yang terjadi pada 9 November 2001 membuat Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap keamanan nasionalnya. Selain melakukan evaluasi tersebut, Amerika Serikat juga merumuskan kembali strategi keamanan sehingga terbitlah sebuah dokumen yang bernama *The National Security Strategy of the USA (USS)* pada 18 September 2002. Isi dari dokumen tersebut adalah perubahan konsep keamanan nasional serta memasukan konsep *preemption* yang berfokus pada kemungkinan terjadinya serangan teroris serta adanya penyebaran senjata pemusnah massal yang benar- benar menjadi ketakutan Amerika Serikat. Konsep *preemption* berarti inisiatif untuk melakukan aksi yang dapat melumpuhkan para teroris bahkan sebelum para teroris tersebut menyerang. (O'Hanlon, Rice, & Steinberg, 2002)

Konsep ini tidak dianjurkan karena sebetulnya dapat mengundang konflik yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan konsep ini dapat mendorong Negara- Negara lain yang juga merasa terancam oleh teroris untuk melakukan hal yang sama sehingga terjadi ketidakamanan internasional. Doktrin yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini ditakutkan sebagai pembenaran terhadap pembenaran terhadap Negara lain terlebih dahulu dengan dalih bahwa Negara tersebut merupakan sarang teroris sehingga mengancam negaranya.

Menurut *NSS*, Amerika Serikat menggolongkan Negara- Negara yang mengancam keamanan negaranya sebagai *Rogue State*. *Rogue State* sendiri memiliki kriteria- kriteria sebagai berikut:

1. Suatu Negara yang pemerintahannya selalu bertindak ofensif serta bertindak dictator yang seringkali mengeksploitasi sumber daya nasional demi kepentingan penguasa.
2. Selalu mengabaikan hukum internasional sehingga mengancam Negara- Negara sekitarnya

3. Terdapat senjata pemusnah massal didalam negaranya. Selain itu memiliki teknologi militer maju yang digunakan untuk mengancam.
4. Menyokong kegiatan terorisme dalam dunia internasional.
5. Memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat serta menolak adanya penghargaan nilai- nilai kemanusiaan.

Doktrin NSS-2002 yang merupakan kebijakan keamanan Amerika Serikat terbaru yang tergolong agresif. Kesimpulan isi dari NSS-2002 diantaranya:

1. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan menerapkan kebebasan serta demokrasi. Amerika Serikat berkeinginan untuk menjadi “Kiblat Ekonomi” bagi seluruh Negara. Dalam konteks doktrin ini, Amerika mengharapkan setiap Negara untuk tidak melakukan pembatasan terhadap pengembangan kapitalis internasional karena hal tersebut dianggap akan membahayakan keamanan Negara.
2. Amerika Serikat mengklaim memiliki hak untuk menyingkirkan berbagai ancaman-ancaman terhadap negaranya dengan melakukan serangan terlebih dahulu bahkan sebelum diserang. Hal tersebut dianggap berbahaya. Karena apabila terjadi maka akan mengancam keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mengancam perlawanan dari berbagai Negara yang tidak terima dengan tindakan semena- mena Bush.
3. Penanggulangan masalah teroris akan dilakukan Amerika Serikat dengan cara pengembangan militer. Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasa perlu adanya pengembangan teknologi militernya baik dengan cara mengembangkan pertahanan rudal.(Winingsih, 2009)

Islam dan Demokrasi

Wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang strategis. Disamping memiliki kebudayaan masa lampau yang strategis, Timur Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam

yang sangat melimpah. Kandungan mineral seperti tembaga, batu bara dan besi menjadi daya Tarik bagi Negara lain. aset berharga Timur Tengah bertambah setelah ditemukannya minyak bumi pada tahun 1930-an khususnya disekitar daerah- daerah teluk.(Konflik, Tengah, Politik, Politik, & Volume, 2013) Hal tersebut tentunya menjadi incaran intervensi dari berbagai negara maju, termasuk Amerika. Banyak yang beranggapan bahwa terjadinya demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah termasuk salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Amerika. Demokratisasi Timur Tengah sebelumnya dianggap sebagai sebuah ketidakmungkinan melihat agama yang dianut oleh negara- negara Timur Tengah adalah Islam. Islam dan demokrasi dinilai merupakan dua hal yang tidak bisa berjalan seiringan. Berkembangnya pemikiran bahwa pemimpin merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan dan yang terpilih menjadi pemimpin merupakan utusan Tuhan menjadikan negara- negara di Timur Tengah memiliki sistem pemerintahan monarki.

Islamisme telah terjadi di Timur Tengah. Dimana Islam bukan hanya menjadi agama yang dianut, melainkan sudah masuk ke dalam perpolitikan. Politik Islam menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi ketimbang sebagai sebuah agama ataupun kepercayaan. Dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, para Kelompok Reformasi menggunakan Islam untuk menyatukan individu- individu yang sering terlibat dalam gerakan Islam, mengintegrasinya menjadi sebuah gerakan sosial baru untuk perubahan dengan adanya demokrasi, kebebasan serta keadilan sosial.(Yasmine, 2015)

Namun, Arab Spring terjadi bukan karena agama. Arab Spring terjadi karena murni ketimpangan ekonomi dan tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Pemimpin yang terlalu arogan serta diktator kelas kakap memimpin negara- negara Timur Tengah, sehingga rakyat Timur Tengah merasa sudah waktunya mereka bergerak dan menyerukan perlawanan. Kesamaan agama merupakan hal kedua yang menjadi alasan para demonstran ini bersatu. Walaupun pada dasarnya kita melihat Islam sebagai alasan pertama para demonstran tersebut berkumpul dan berani menyerukan revolusi di Timur Tengah.

Lalu, bagaimana demokrasi dapat berkembang di negara Islam seperti di negara- negara Timur Tengah? Samuel P. Huntington mengatakan bahwa Islam membatasi dekratisasi. Agama dapat menjadi motivasi hidup seorang Individu. Bagi umat Muslim, Islam merupakan pedoman hidup, filosofi moral, sistem kepercayaan atau perintah spiritual. Islam merupakan pedoman terlengkap bagi penganutnya.(Cook & Stathis, 2012) Islam berjalan di Timur tengah dalam meliputi praktik- praktik agama dan kehidupan sosial. Didalam keduanya, Islam sudah tidak dapat dibedakan lagi.

Dalam kehidupan negara Islam Ideal, kegiatan perpolitikan haruslah mendapat persetujuan Tuhan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Agama mengatur segala bentuk kehidupan termasuk kehidupan politik. Keputusan politik dibentuk bukan atas kehendak autokrasi atau elit politik yang berkuasa, melainkan hukum Tuhanlah yang mengatur semua. Negara dan pemerintahan harus menjamin semua Muslim dapat beribadah dengan baik. Itulah yang dinamakan Negara Islam yang Ideal.

Dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, demokrasi dianggap sebagai sebuah titik terang dimana rakyat menginginkan kekuasaan berada di tangan mereka. Klaim tentang Negara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak mungkin sekiranya dapat dipatahkan disini. Mengingat bahwa demokrasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan ketimpangan yang selama ini diciptakan oleh para pemimpin otoriter tersebut. Merupakan sebuah tantangan menciptakan demokrasi di negara yang belum pernah berkenalan dengan demokrasi sebelumnya. Demokrasi merupakan sebuah system pemerintah dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan langsung oleh rakyat atau oleh wakil yang terpilih dalam pemilihan umum. Demokrasi berkembang secara pesat pada masa renaissance. Pada masa ini masyarakat menempati posisi secara langsung di pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi mengharuskan adanya partisipasi langsung dari rakyat(Hakiki, 2016). Demokrasi dianggap merupakan sebuah system yang ideal yang mampu mengjindari

konflik satu sama lain, *democracies tend not to go to war with each other.*(Mansfield & Pollins, 2003)

Salah satu unsur penegak demokrasi adalah Masyarakat Madani (*civil society*), yakni masyarakat yang terbuka serta terbebas dari pengaruh dan tekanan dari Negara lain. masyarakat Madani merupakan masyarakat yang aktif sebagai kontrol dari kinerja pemerintah.(Rangkuti, 2019) Dalam Islam, demokrasi tidak bertentangan dengan prinsip dan ajarannya. Demokrasi melakukan proses pemilihan dengan cara melibatkan banyak orang. Islam tidak membatasi kebebasan berbicara, dan mengutarakan pendapat asalkan sesuai dengan norma dan adab yang berlaku.

Dinamika Demokratisasi di Irak

Semenjak peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika, isu teroris menjadi masalah yang paling mengancam internasional. Ditambah dengan pernyataan Presiden Bush yang mengaitkan perang dan terorisme. Selain itu, Timur Tengah, Afrika dan juga Asia diliputi oleh aktivitas teroris yang mengancam, terdapat juga pelecehan sosial serta merajalelanya ketidakadilan hukum yang membentuk masyarakatnya menjadi demikian. Namun bukan berarti Amerika dan Eropa terbebas dari hal tersebut. Melainkan Amerika dan Eropa masih terikat dengan kekacauan politik juga kekerasan sosial. Dari isu teroris tersebut menjadikan Amerika berusaha untuk membentuk pemerintahan yang demokratis di Irak. Terdapat beberapa tahap dalam proses mendemokrasi Irak. Tahap- tahap tersebut menjadi cikal bakal adanya pemerintahan transisi Irak. Irak melakukan pemilu pada tahun 2005. Namun, upaya demokratisasi itu tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat. Hal tersebut menimbulkan dasar keyakinan Amerika atas munculnya gerakan teroris di Irak. Gerakan teroris ini menentang kebijakan Amerika Serikat dalam usaha demokratisasi Irak.(Samudra, 2018)

Sekitar tahun 2001, sebelum terjadinya penyerangan 9/11, kepemimpinan Al- Qaeda di Afghanistan menerima kunjungan di pemimpin faksi Islam Kurdi. Pertemuan tersebut

membicarakan sebuah rencana pembentukan Al- Qaeda di Irak Utara. Ditemukannya sebuah dokumen di Kabul yang berisi pernyataan tujuan dari kelompok tersebut yaitu untuk mengusir orang- orang Yahudi dan Kristen yang berada Kurdistan serta mengajak orang- oaring untuk bergabung dengan jalan jihad.

Irak memulai proses demokratisasi setelah sukses menggulingkan rezim Baath pada sekitar tahun 2003. Pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika, Irak mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan sosial, ekonomi serta politik yang diakibatkan oleh perang yang terjadi antara Amerika dan Irak. Perubahan sosial terbesar yang terjadi di Irak berlangsung setelah penggulingan rezim Saddam Husein. Perubahan sosial ini berujung pada perang saudara antara pendukung Saddam Husein dengan para oposisi yang sangat kontra dengan pemerintahan Saddam Husein.

Dinamika Demokratisasi di Suriah

Suriah merupakan sebuah Negara yang terbilang cukup stabil bila dibandingkan dengan Negara lain yang terlibat Arab Spring. Sama seperti Negara tetangganya, pemerintahan Suriah juga menganut sistem otoriter. Suriah dipimpin oleh satu partai penguasa yang mewarisi kepemimpinannya secara turun temurun.

Arab Spring dianggap sebagai penyelamat dari krisis pemerintahan yang terbilang kejam. Berbagai protes dilakukan oleh rakyat Suriah demi mendapat perhatian dari pemerintah serta menghilangkan ketidakadilan di negaranya. Tidak cukup hanya dengan protes dan turun ke jalan, aksi bakar diri yang pernah dilakukan oleh Mohamed Bouazizi kembali dilakukan oleh Hasan Ali Akhleh, seorang penduduk al- Hasaka.

Demonstrasi besar- besaran memuncak pada Februari 2011. Demonstrasi tersebut diserukan dengan melalui situs- situs media baik di dalam maupun di luar Suriah. Hal tersebut untuk mendesak pemerintah segera melakukan reformasi. Namun disayangkan, aksli yang

mereka lakukan tidak memberikan hasil yang sama seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Para demonstran juga mendapat ancaman dari pihak keamanan agar segera menghentikan demo serta berbagai aksi tentang seruan reformasi tersebut. Akhirnya, ancaman- ancaman yang diterima oleh para demonstran berhasil menyurutkan semangat revolusi secara perlahan.

Penerapan Peace Democracy Theory di Irak dan Suriah

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang paling demokrasi di dunia. Keterlibatannya dalam menggaungkan nama demokrasi di dunia sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, Kebijakan Luar Negeri Amerika mengeluarkan sebuah strategi yang dikenal dengan “*Forward Strategy of Freedom in the Middle East*” menjadi sebuah jawaban adanya keterlibatan Amerika dalam demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah. Hegemoni Amerika terhadap Timur Tengah sudah dimulai sejak akhir perang dingin antara blok barat dan blok timur. Keberhasilan blok barat membuat Amerika berusaha keras untuk membendung penyebaran paham komunis di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah. Selain melakukan penghentian paham komunis, Amerika juga melakukan penyebaran paham demokrasi yang diakui sebagai system pemerintahan terbaik (Utama Firmanda, 2017). Untuk memperkuat kekuatannya, Amerika pada masa Regan banyak menjalin hubungan dengan Negara- Negara seperti Israel, Jordania dan Arab Saudi (Setiawan, 2013).

Presiden Bush mengatakan dalam pidato yang dikeluarkan pada tahun 2003 bahwa demokrasi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya demokrasi di Turki dan juga Indonesia. Amerika telah menyebarkan demokrasi ke tempat yang belum pernah ada sebelumnya, dan Presiden Bush percaya bahwa demokrasi akan meningkatkan perdamaian dan keamanan bagi negaranya dan juga Timur Tengah. Pidatonya tersebut juga menjelaskan tentang Inisiatif Kemitraan Timur Tengah. Yaitu menetapkan inisiatif pertama untuk mendukung upaya reformasi politik dan pengembangan ekonomi melalui perempuan dan pemuda (Endowment, Address, & East, 2003).

Pidato yang dipublikasikan pada tahun 2003 tersebut bisa dikatakan menjadi bukti keterlibatan Amerika dalam *Arab Spring* yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Ambisi Amerika dalam mendemokratisasikan negara- negara yang belum

menerapkan demokrasi sangat terlihat. Hal tersebut dikarenakan Amerika dapat dengan leluasa bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan negara demokrasi sehingga dapat menguntungkan Amerika sendiri. Amerika membentuk GMEI (*Greater Middle East Initiative*) untuk melancarkan proses demokratisasi di Timur Tengah. Namun, menurut Eddie J. Girdner GMEI bukan dibentuk untuk memfasilitasi kebebasan di Timur Tengah, melainkan untuk mempermudah Amerika memperoleh kepentingannya.(Girdner, 2004) GMEI tidak lain adalah alat untuk perluasan dan konsolidasi neoliberalisme di Timur Tengah dan juga Indonesia.(Girdner, 2005)

Intervensi Amerika terhadap Timur Tengah dalam peristiwa Arab Spring

Intervensi menurut J.G Starke adalah sebuah tindakan propaganda yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan adanya revolusi atau peperangan di negara lain. Kemudian pengertian intervensi menurut Black's Law Dictionary yakni *one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affair or in question arising between other nation* atau campur tangan satu negara dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dalam urusan internal negara lain atau dalam pertanyaan yang timbul antara negara lain. Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa intervensi merupakan salah satu bentuk penguasaan terhadap negara lain dengan adanya campur tangan dalam bentuk kekerasan atau dalam bentuk pernyataan yang timbul antara negara lain.

Bentuk Intervensi yang dilakukan oleh Amerika adalah ikut campur dalam politik dalam negeri beberapa negara di Timur Tengah. Keeksotisan Timur Tengah menjadi daya tarik bagi Amerika untuk menguasai sumber daya alamnya. Minyak bumi yang melimpah merupakan tujuan utama Amerika melakukan intervensi terhadap Timur Tengah. Terbukti dengan pembentukan negara boneka di Irak. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguasai minyak bumi yang terdapat di Irak. Selain ikut campur terhadap politik dalam negeri negara Timur Tengah, Amerika juga memberikan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Bush tentang pelucutan senjata yang berada di Irak dengan meminta PBB untuk memenuhi

piagamnya dan meminta Badan Energi Atom Internasional untuk melacak dan mengendalikan bom nuklir yang ada di dunia khususnya yang berada di Irak. Selain itu, bentuk intervensi Amerika juga sangat terasa di Iran. Masih dalam pidato Presiden Bush dalam State of the Union, Amerika masih terus memperhatikan pemerintahan Iran yang menindas rakyat. Selain itu Amerika juga mencari senjata pemusnah massal yang berada di Iran dan memberantas teror yang terjadi di negara tersebut. Presiden Bush juga mendukung warga Iran yang mempertaruhkan nyawa dan terus terintimidasi karena menyerukan demokrasi di Iran (the washington post, 2003).

Kepentingan Amerika melakukan intervensi ke Timur Tengah sudah dilakukan sejak tahun 1970-an. Demokratisasi Timur Tengah dianggap sebagai satu cara intervensi Amerika dalam pemerintahan agar Amerika lebih dengan mudah mendapat hati rakyat yang sedang terpuruk dalam pemerintahan yang otoriter. Kebijakan luar negeri Amerika yang dikeluarkan melalui pidato Presiden Bush adalah sebuah penekanan terhadap Negara Timur Tengah yang dianggap sebagai sarang teroris berdasarkan pada penyerangan 11 September 2001. Demokratisasi yang terjadi pada *Arab Spring* di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 merupakan perpanjangan tangan dari Kebijakan Luar Negeri Amerika *Forward Strategy for Freedom in the Middle East*. Demokratisasi Timur Tengah ditujukan bukan semata-mata untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat Timur Tengah, namun juga meminimalisir ancaman-ancaman bagi Amerika yang bukan lagi Negara- Negara melainkan actor- actor sub- Negara yang terlibat dalam kegiatan teroris. Para perencana kebijakan luar negeri ini percaya bahwa pelaku teroris pada 11 September 2001 serta banyak insiden yang bersangkutan dengan kegiatan teroris lainnya berasal dari Negara yang belum menerapkan demokrasi di dalamnya (Neep, 2003). Untuk melancarkan kepentingannya, Amerika memperoleh izin untuk menempatkan pasukan secara permanen di Timur Tengah dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa wilayah kawasan (Darwis, 2015).

Liberalisasi Sipil di Irak dan Suriah

Irak merupakan Negara yang belum siap menerima demokratisasi. Hal ini menyebabkan adanya anti-tesis dari demokrasi itu sendiri. Rezim Saddam Husein diyakini lebih mengarahkan kebijakan- kebijakannya untuk mengantisipasi ancaman dari luar dengan cara melakukan penguatan kapasitas Negara. Demokratisasi yang dilakukan di Irak membuat adanya pergerakan massa di Irak. Massa memaksa pemerintahan Saddam Husein turun dari jabatannya. Pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab rezim ini diturunkan. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah serta korupsi yang tinggi. Sekitar tujuh juta penduduk Irak berada di bawah garis kemiskinan.

Kejadian yang sama terjadi juga di Suriah. Ideologi Suriah pada awalnya tidak mengarah pada sikap otoriter, melainkan sosialisme islam. Pada masa Basyar Assad berbagai masalah muncul. Kebebasan media mulai dibatasi dengan diterbitkannya UU media pada tahun 2007. Bukan hanya itu, Basyar Assad juga memblokir situs website pada tahun 2011. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya provokasi terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah.

Pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet pada tanggal 29 Maret 2011. Hal ini ditunjukkan untuk memenuhi tuntutan para demonstran. Kemudian, sehari setelah diumumkannya pengunduran diri tersebut, Presiden Basyar Assad berani tampil didepan publik untuk yang pertama kalinya sejak konflik berkejolak di Suriah. Presiden Assad menyampaikan pidato untuk meredakan emosi para demonstran. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Assad menyebutkan adanya intervensi dari luar yang menyebabkan demonstrasi pecah serta konflik di Suriah. Selain itu, Presiden Assad juga mengakui adanya kekhawatiran yang ditimbulkan oleh para demonstran. Namun, Assad menolak adanya reformasi secara sekaligus di Suriah. Dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya yakni melakukan reformasi secara bertahap. Sehingga dengan demikian esensi dari reformasi tersebut akan terasa oleh masyarakat Suriah. Setelah pidato tersebut disampaikan, media Suriah kemudian memberitakan bahwa telah dibentuk sebuah komisi untuk kemungkinan pencabutan hukum darurat oleh Basyar al-Assad.

Berikut adalah tabel perbandingan liberalisasi yang terjadi di Irak dan Suriah

Tabel Liberalisasi Irak dan Suriah

	Irak	Suriah
Liberalisasi Sipil	<p>Rezim yang korup dan juga pemerintahan yang bertindak otoriter memperburuk keadaan perekonomian di Irak yang kemudian menekan masyarakat Irak untuk melakukan demonstrasi guna menyampaikan keluhan serta keberatan atas pemerintah yang berkuasa. Dari demonstrasi ini masyarakat menginginkan rezim untuk turun yang kemudian ditanggapi dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Tindakan kekerasan ini kemudian membuat konflik berkepanjangan antara demonstran dan pihak pemerintah</p>	<p>Adanya penangkapan yang berujung dipenjarakannya 15 anak di bawah umur karena menuliskan slogan anti pemerintah. Anak-anak ini pun mengalami penyiksaan ketika berada dalam tahanan. Peristiwa tersebut menyebabkan masyarakat Suriah melakukan protes dengan cara turun ke jalan dan melakukan demonstrasi dengan tujuan membebaskan anak-anak tersebut. Namun aksi protes ini ditanggapi dengan</p>

		perlakuan kekerasan dari aparat keamanan yang kemudian mengundang demonstrasi besar-besaran serta konflik berkepanjangan.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel tersebut dapat terlihat perbandingan liberalisasi sipil yang terjadi di Irak dan Suriah yakni adanya pergerakan massa karena masalah yang hampir sama. Keadaan ekonomi Irak yang buruk ditambah dengan merajalelanya korupsi serta pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab turunnya massa ke jalanan untuk menyerukan keluh kesahnya terhadap pemerintah. Namun sayang, aksi yang dilakukan oleh rakyat Irak ini justru ditanggapi dengan tidak baik. Aparat keamanan menembaki serta melakukan tindakan kekerasan untuk menghalau para demonstran. Akibatnya terjadilah konflik berkepanjangan antara demonstran dan pihak pemerintahan. Hal yang sama pun terjadi di Suriah, tatkala para petugas keamanan yang bertindak dengan menggunakan kekerasan dalam merespon demonstrasi yang terjadi di Suriah. Penangkapan 15 pelajar menyebabkan massa turun ke jalan untuk menyatakan protes serta tuntutan pembebasan terhadap pelajar tersebut.

Liberalisasi sipil yang dilakukan rakyat kedua Negara tersebut berawal dari sebab yang berbeda. Walaupun sudah terjadi partisipasi politik di Irak dan Suriah, namun demokratisasi yang terjadi dapat dikatakan gagal. Partisipasi rakyat Irak dan Suriah terhadap politik terlihat dari protes yang dilakukan untuk menuntut rezim yang berkuasa mengganti sistem yang berlaku dan menggantinya dengan demokrasi. Gagalnya demokratisasi ini diakibatkan oleh konflik berkepanjangan antara para demonstran dan pihak pemerintah. Hal ini kemudian membuktikan bahwa kedua Negara tersebut belum siap menerima demokrasi.

Partisipasi Sipil di Irak dan Suriah

Proses demokratisasi yang terjadi di Irak juga menggugah konflik antar etnis. Kelompok Kurdi dan Syiah merasa sangat diuntungkan dengan adanya proses politik di Irak, namun kelompok Sunni merasa dirugikan. Etnis Kurdi merasa diuntungkan dalam politik dan juga budaya. Hal ini dikarenakan Kurdi memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang signifikan. Kemudian Syiah merupakan kelompok yang dominan dalam pemerintahan. Keadaan berbeda terjadi pada kelompok Sunni. Dimana pada awalnya Sunni merupakan kelompok yang menguasai pemerintahan, namun kini harus kehilangan kekuasaannya. Kondisi ini menjadikan adanya konflik antara ketiga etnis ini.

Kelompok pemerintahan meminta tentara Amerika untuk tetap berada di Irak dengan alasan keamanan. Hal tersebut tentu saja ditentang oleh kelompok Sunni. Mereka menginginkan Irak terbebas dari intervensi Amerika Serikat dan menjalankan kehidupan politiknya sendiri. Kelompok Sunni juga menuntut agar semua masalah Irak diselesaikan oleh internal tanpa adanya keterlibatan pihak luar. Selain itu, adanya tuntutan yang menghendaki proses politik Irak diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Bahkan mereka menuntut kelompok perlawanan untuk ikut serta dalam proses politik di Irak. Namun, tuntutan itu ditolak pemerintah disebabkan belum adanya kepercayaan pihak pemerintah terhadap kelompok perlawanan. Perang sipil juga terjadi di Suriah. Proses demokrasi yang terjadi di Suriah menjadi pemicu konflik sehingga menyebabkan peperangan. Masuknya beberapa pejuang jihad ke Suriah seperti al- Qaeda menjadi penyebab tambahan konflik di Suriah tidak kunjung mereda.

Terdapat beberapa kekuatan yang berasal dari elemen masyarakat, diantaranya:

1. Ulama- ulama Sunni dan Syiah
2. Lembaga keagamaan
3. Kelompok perlawanan

Menurut *The Economist*, sekitar 61 kelompok gerilyaman bersenjata masih ada bahkan sampai dengan pemerintahan Irak terbentuk. Kemudian *Wolfowitz* membagi kelompok perlawanan tersebut menjadi lima kelompok, yakni:

1. Teroris asing
2. Penjarah
3. Kriminal
4. Pendukung rezim Saddam Husein
5. Kelompok teroris dukungan Iran

Aliran politik yang ada di Irak tidak dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, karena mereka memiliki ruang gerak yang terbuka serta penggunaan senjata yang bebas. Hal tersebut menjadikan kondisi pergolakan politik di Irak menjadi lebih dinamis. Aliran- aliran politik tersebut kemudian berafiliasi dengan partai- partai politik yang mempunyai kepentingan sendiri. Hal tersebutlah yang kemudian mengundang konflik berkepanjangan.

Konflik antar etnis yang berlangsung di Irak ini terus berkembang. Penyerangan dilakukan di tempat- tempat ibadah seperti masjid Syiah maupun Sunni. Bahkan penyerangan pun terjadi di rumah sakit serta fasilitas umum lainnya. Serangan tersebut berbentuk bom bunuh diri, penculikan, perusakan fasilitas umum serta pemutusan aliran listrik.

Terdapat dua pola pergolakan kekuatan politik yang terjadi di Irak. Hal tersebut menggambarkan demokratisasi di Irak hanya bersifat procedural. Proses politik belum diikuti dengan stabilitas keamanan, namun justru memecah belah struktur keamanan dalam bermasyarakat juga melmahkan konstitusi bernegara. Kelompok sekte dan etnis yang kepentingannya tidak terwakili oleh pemerintah terus melakukan perlawanan. Peristiwa ini membuat stabilitas keamanan sulit diwujudkan.

Pengeboman yang terjadi di masjid Askariyah, Samarta menjadi bukti bahwa konflik etnis dan sectarian di Irak mencapai titik klimaks. Hal ini kemudian berpengaruh pada proses politik yang terjadi di Irak. Bom bunuh diri kembali terjadi menjelang pemilihan pejabat pemerintahan.

Perang sipil yang terjadi di Suriah ini disebabkan adanya perebutan kekuasaan antara rezim yang berkuasa, pihak oposisi serta kelompok jihadis. Berbagai cara dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan pemerintahannya. Bashar Assad telah membangun empat pilar yang terkenal juga sebagai pilar- pilar ayahnya dalam menjalankan pemerintahan. Keempat pilar tersebut yakni:

1. Kekuasaan pemerintahan berada di klan al- Assad
2. Menyatukan kaum minoritas
3. Pemerintahan mengontrol seluruh militer dan intelejen
4. Melakukan monopoli Partai Ba'ath

Pemerintahan Assad juga memberlakukan undang- undang darurat yang digunakan untuk membungkam para lawan politiknya. Bukan hanya itu saja, para oposisi yang dianggap mengganggu pemerintahan ditekan perlawanannya serta ditindas. Kemudian pada tahun 2004, Assad juga mengerahkan kekuatan militer untuk menghentikan protes yang dilakukan oleh etnis Kurdi. Dampak dari aksi militer ini adalah ratusan nyawa melayang yang kemudian menyebabkan Suriah dikucilkan dari pergaulan internasional.

Kelompok penentang pemerintah harus melawan kelompok Hizbullah yang berasal dari Lebanon. Hal ini dikarenakan pemerintahan Suriah didukung oleh Syiah yang juga merupakan etnis yang menguasai Hizbullah. Para militant syiah ini berjanji tidak akan tinggal diam apabila kelompok aliansi yang berada di damaskus mengalami penyerangan. Bahkan pemimpin Syiah Hizbullah menekankan bahwa anggota Hizbullah akan terus mempertahankan Suriah dari para ekstrimisme Islam.

Kelompok oposisi Suriah membentuk *Free Syirian Army* dan kemudian menguasai wilayah Aleppo serta bagian selatan dari Suriah. Kemudian dengan berjalannya waktu, oposisi Suriah ini pecah menjadi dua, yakni kelompok oposisi yang bertahan dengan politik moderat asli dan kelompok yang mengejar visi islam untuk Suriah yang dikenal dengan ISIL.

Demokratisasi membuat kelompok oposisi di Suriah meyakini bahwa tidak ada cara lain untuk dapat menurunkan rezim yang berkuasa selain demokrasi. Adanya bantuan dari Amerika juga terhadap salah sat etnis juga merupakan bagian untuk memperkuat upaya masuknya

demokrasi dan menghambat masuknya komunis di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan Rusia terhadap kelompok pemerintahan di Suriah.

Berikut adalah tabel perbandingan terjadinya partisipasi politik sipil di Irak dan Suriah:

Tabel Partisipasi Politik Sipil Irak dan Suriah

	Irak	Suriah
Partisipasi politik Sipil	Terjadinya perebutan kekuasaan antara Kurdi, Syiah dan Sunni. Sunni merasa menjadi minoritas ketika Kurdi dan Syiah dominan dalam pemerintahan. Hal ini menjadikan adanya konflik antara Syiah dan Sunni.	Terdapat tiga kelompok besar yang menginginkan pemerintahan Suriah. Ketiga kelompok tersebut adalah pihak pemerintahan, pihak oposisi serta kelompok jihadis. Terjadi konflik antara ketiga kelompok ini. Masing-masing kelompok menginginkan Suriah berjalan sesuai dengan ideologi mereka.

Dari tabel tersebut terlihat adanya partisipasi politik dari keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam proses demokratisasi. Hanya saja, demokratisasi yang terjadi di Irak dan Suriah kembali dikatakan gagal karena kelompok-kelompok tersebut memasukan

kepentingannya ke dalam partai politik. Sehingga hadirnya partai politik hanya sebagai penampung kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, konflik terjadi antara kelompok yang menginginkan kepentingannya tercapai.

Kesimpulan

Wilayah Timur Tengah merupakan daerah eksotis yang menyimpan banyak pesona bagi Negara- Negara sekitarnya. Ketersediaan sumber daya yang melimpah menjadi hal utama yang menjadikan Timur Tengah sebagai primadona. Tragedi *Arab Spring* menjadi proses awal terjadinya demokratisasi di Timur Tengah. Hal ini tidak terlepas dari intervensi Amerika untuk lebih mudah menguasai Negara- Negara Timur Tengah serta kepentingan nasional dalam negerinya sendiri. Pemerintahan otoriter yang berkuasa di Timur Tengah pun berguguran satu persatu seperti daun- daun yang berguguran di musim semi. Islam dan demokrasi diharapkan dapat berjalan beriringan demi terciptanya kedamaian di Timur Tengah.

Berdasarkan analisa dari berbagai sumber, penulis menarik kesimpulan mengenai upaya demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Melalui *Forward Strategy for Freedom in the Middle East*, Amerika Serikat menggunakan dua cara dalam demokratisasinya, yakni menggunakan liberalisasi dan partisipasi politik sipil.

Bentuk liberalisasi sipil ini adalah terjadinya demonstrasi atau bahkan sabotase yang dilakukan oleh rakyat sipil. Demokratisasi yang dilakukan di Irak membuat adanya pergerakan massa di Irak. Massa memaksa pemerintahan Saddam Husein turun dari jabatannya. Pemerintahan yang otoriter menjadi penyebab rezim ini diturunkan. Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah serta korupsi yang tinggi. Sekitar tujuh juta penduduk Irak berada di bawah garis kemiskinan.

Demonstrasi juga berlangsung di Suriah. Berawal dari penangkapan pelajar yang menyerukan tuntutan agar rezim Basyar Assad turun. Mengetahui para pelajar tersebut mengalami penyiksaan selama ditahan, maka lahirlah gelombang protes yang lebih besar. Protes yang terjadi pada 11 Maret 2011 ini menuntut agar pemerintah membebaskan anak-anak yang telah dipenjarakan. Namun, pemerintah merespon dengan cara yang tidak mereka harapkan. Akhirnya berlangsunglah konflik berkepanjangan antara para demonstran dan pihak keamanan.

Selanjutnya, partisipasi politik sipil yang terjadi adalah adanya konflik antar etnis di Irak dan Suriah. Di Suriah, kelompok Kurdi dan Syiah merasa sangat diuntungkan dengan adanya proses politik di Irak, namun kelompok Sunni merasa dirugikan. Etnis Kurdi merasa diuntungkan dalam politik dan juga budaya. Hal ini dikarenakan Kurdi memenangkan pemilu dengan perolehan suara yang signifikan. Kemudian Syiah merupakan kelompok yang dominan dalam pemerintahan. Keadaan berbeda terjadi pada kelompok Sunni. Dimana pada awalnya Sunni merupakan kelompok yang menguasai pemerintahan, namun kini harus kehilangan kekuasaannya.

Kemudian di Suriah, terjadinya perebutan kekuasaan antara kelompok pemerintahan yang dibantu oleh Rusia dan kelompok Hizbullah dengan kelompok oposisi yang mayoritas merupakan Sunni serta dengan para jihadis yang menginginkan Suriah menjadi Negara khilafah. Dalam kasus ini, Amerika membantu para oposisi untuk melawan kedua kelompok lainnya dengan tujuan agar dapat menguasai pemerintahan.

Liberalisasi dan partisipasi politik sipil yang terjadi di Irak dan Suriah memang dapat dikatakan telah berhasil dalam menggerakkan partisipasi politik masyarakatnya. Namun, demokratisasi yang terjadi justru sebaliknya. Demokratisasi mengalami kegagalan dalam menjalankan prosesnya. Hal ini dikarenakan terjadinya konflik berkepanjangan yang diakibatkan oleh partisipasi politik rakyat yang dianggap belum siap menerima demokrasi. Sehingga yang akhirnya didapat oleh Irak dan Suriah bukanlah demokrasi, melainkan konflik serta masalah-masalah besar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cook, B. J., & Stathis, M. (2012). Democracy and Islam: promises and perils for the Arab Spring protests. *Journal of Global Responsibility*, 3(2), 175–186. <https://doi.org/10.1108/20412561211260485>
- Darwis, D. (2015). Kerangka Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Timur Tengah Pasca Arab Spring.
- DHS. (2008). *Brief Documentary History of the Department of Homeland Security 2001-2008*. 35.
- Endowment, N., Address, D., & East, M. (2003). National Endowment for Democracy Address on the Middle East. *Chamber of Commerce*, (November), 1–8.
- Fakhry Ghafur, M. (2014). Agama Dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya 1 Religion and Democracy : the Emergence of the Power of Political Islam in Tunisia, Egypt and Libya. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 85–100.
- Girdner, E. J. (2004). Operation Iraqi Freedom: Invasion, Occupation and Consolidation of US Hegemony in Iraq. *Punjab Journal of Politic*, 28 (2), 1–31.
- Girdner, E. J. (2005). the Greater Middle East Initiative: Regime Change, Neoliberalism and Us Global Hegemony. *Milletleraras*, 001–035. https://doi.org/10.1501/intrel_0000000111
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>
- Hermawan, S., & M. Nur Rokhman, M. P. (2016). KONFLIK DI SURIAH PADA MASA BASHAR AL-ASSAD TAHUN 2011-2015. *Risalah Vol 3 Edisi 10 Oktober Tahun 2016, vol 3 edis*, 1–17.
- Jatmika, S. (2016). The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0037.157-166>
- Juliandi, B. (2016). Wakaf dan Politik di Tunisia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 137–144. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2857>
- Konflik, M., Tengah, T., Politik, T. G., Politik, J., & Volume, P. (2013). *Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik) Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013*. 1.
- Korotayev, A. V., & Zinkina, J. V. (2011). Egyptian revolution: a demographic structural analysis. *Entelequia - Revista Interdisciplinar*, 13(primavera 2011), 139–170.
- Mansfield, E. D., & Pollins, B. M. (2003). Interdependence and Conflict: An Introduction. *Economic Interdependence and International Conflict: New Perspectives on an Enduring Debate*, 1–28.
- Neep, D. (2003). Dilemmas of Democratization in the Middle East. *Middle East Policy*, VOL. XI, N, 73–

- O'Hanlon, M. E., Rice, S. E., & Steinberg, J. B. (2002). The New National Security Strategy and Preemption. In *Brookings Policy Brief*. Washinton, DC.
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 49–59.
- Sahasrad, H. (2013). ARAB SPRING: PERUBAHAN REZIM DAN TEGANGAN HUBUNGAN AS – DUNIA ARAB REFLEKSI SOSIO-HISTORIS. *Jurnal CMES Volume VI Nomor 1, Edisi Januari - Juni 2013*, VI, 36–54.
- Samudra, D. R. (2018). Pengaruh Demokrasi Terhadap Perkembangan Terorisme Irak. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(2), 283–291.
- Setiawan, A. (2013). Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat terhadap Konflik SipilMiliter Mesir Tahun 2013. *JOM FISIP*, 2(SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-16-2 / ISSN 1314-2704), 1–39.
- the washinton post. (2003). *Text of President Bush's 2003 State of the Union Address*. Washinton DC.
- United States Government. (2001). The USA PATRIOT Act : Preserving Life and Liberty. *USA Department of Justice*. Retrieved from http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf
- Utama Firmanda, L. W. P. T. (2017). Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017. *Jurnal ICMES*, 1(1), 25–44. Retrieved from <https://ic-mes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/view/2>
- Wangke, H. (2012). “Arab Spring” Dan Perebutan Pengaruh di Suriah. *Jurnal Politika*, Vol 3, 001–161.
- Winingsih, S. (2009). *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap pengembangan nuklir Iran*.
- Yasmine, S. E. (2015). Arab Spring : Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah Arab Spring : Islam within social movement and democracy in the Middle. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(2), 110–112.